

PERKARA DAN DISKUSI: DARI NAMA “TEOLOGI” KE “FILSAFAT DIVINITAS” (FILSAFAT KEILAHIAN)

Armada Riyanto CM¹

A. DIMANA PERKARANYA?

Perkaranya ada di sini: *UU 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI*

PASAL 7:

(4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

PASAL 10

(2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

- a. rumpun ilmu agama;*
- b. rumpun ilmu humaniora;*
- c. rumpun ilmu sosial;*
- d. rumpun ilmu alam;*
- e. rumpun ilmu formal; dan*
- f. rumpun ilmu terapan.*

PENJELASAN

Pasal 10

Ayat (2) Huruf a :

Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu.

Huruf b:

*Rumpun ilmu **Humaniora** merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain **filsafat**, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa.*

¹ Pengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Widya Sasana, Malang. Makalah ini disampaikan dalam Seminar “Memikirkan Kembali teologi dalam Konteks Wacana Keilmuan, Pendidikan Tinggi, dan Masyarakat”, Universitas Sanata Dharma, Fakultas Teologi, Yogyakarta, 10 Desember 2014.

B. INILAH PERKARANYA:

STFT atau FT atau Sekolah Pendidikan Agama atau Seminari Tinggi dan sekitar itu yang menyelenggarakan prodi-prodi dengan nama “agama”, “teologi”, “misiologi”, konseling pastoral”, *sudah pasti* masuk dalam gerbong Departemen Agama menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam sejarah Gereja Katolik ilmu teologi memiliki “keterpautan” pergumulan yang nyaris sempurna dengan ilmu filsafat. Nyaris sempurna, karena filsafat dalam diri seorang Agustinus atau Thomas Aquinas atau Anselmus atau Pseudo-Dyonisius Areopagus dan lain-lain memiliki karakter teologis; dan sebaliknya teologi bagi mereka bersifat filosofis. *Summa Theologica* dari Thomas Aquinas atau bahkan *Itinerarium Mentis in Deum* dari Bonaventura atau *Confessiones* dari Agustinus merupakan contoh “perkawinan tak terceraikan” dari Filsafat dan Teologi.

Jangankan bicara tentang *De Divinis Nominibus* dari Pseudo-Dyonisius atau *Proslogion* dari Anselmus, jika kita menengok Karl Rahner atau Chenu atau Bernard Lonergan atau bahkan Benedictus XVI sekali pun, keterpautan antara filsafat dan teologi sungguh-sungguh terlihat jelas. Artinya, kedua bidang ilmu ini, filsafat dan teologi punya sejarah perjalanan panjang keterpautan satu sama lain.

Kini, kehadiran UU No. 12 Tahun 2012 dengan menegaskan “teologi” masuk ke rumpun Agama, sementara “filsafat” masuk ke wilayah Humaniora, bagi kalangan Katolik merupakan sebuah hantaman yang mengacau-balaukan sistem keilmuan dan keilmiahan teologi. Lepas dari perkara prosedural birokrasi atau apalah namanya yang berkaitan dengan rancangan-rancangan anggaran bantuan atau apa pun, UU 12-2012 ini jelas memiliki dampak bagi pengembangan teologi di Indonesia. Halnya perlu pemahaman dan simakan yang serius dari kawan-kawan teologi dan filosof Katolik.

Seorang kawan dari Bimas Katolik membuat tulisan yang dimuat di jurnal pendidikan, *Educare* (saya membaca tulisan di jurnal itu). Dia menanggapi bahwa perkara ilmu “teologi” masuk ke Depag itu perkara “pembagian tugas” saja.

Dengan berkata begitu, kawan dari Bimas tersebut melakukan simplifikasi berbahaya, simplifikasi pemahaman yang tidak difondasikan pada perspektif pengetahuan historisitas ilmu teologi (sebagai ilmu dalam ranah Prodi di Perguruan Tinggi Indonesia; sebab tulisan sejenis ini jelas bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1996); tak hanya itu, melainkan juga menafikan historisitas ilmu teologi secara menyeluruh dalam sejarah perkembangan ilmu tersebut dan dalam pergulatan sejarah Gereja Katolik sejak perkembangan awalnya.

Jika menyimak secara detil, Konsili Nicea-Kalsedon merupakan “buah” paling jelas dari keterpautan kedua ilmu, teologi dan filsafat. Konsili Nicea-Kalsedon-Konstantinopel menghasilkan “mahakarya” teologis, pembakuan iman yang kita ucapkan sampai hari ini berupa “Credo.” Mengenai poin ini akan saya tulis secara lebih ekstensif pada bagian lain.

Dengan tetap tidak mengurangi rasa hormat secara personal, saya punya kesan kawan tadi barangkali juga menjadi semacam contoh sikap para birokrat Indonesia yang tidak konsisten. Tidak konsisten dalam arti demikian: Jika sebuah “ilmu” berada dalam wilayah “keilmiahan”, dapatkah ranah “keilmiahan” dibagi-bagi dalam tugas-tugas birokrasi pemerintah? Dapatkah birokrasi pemerintah *menjamin* keilmiahan dan

memahami pergulatan sebuah “ilmu”? Atau, jika tugas lembaga pemerintahan bukan pada poin keilmiahannya melainkan pada wilayah birokrasi penyelenggaraan kelembagaan, mengapa memasukkan dan mengharuskan program studi ilmu “teologi” dalam gerbong departemen keagamaan? Dalam sejarah tradisi Gereja Katolik, “teologi” merupakan disiplin ilmu yang menjadi pergulatan akal budi dan iman sekaligus dalam cara yang sangat kompleks.

Ensiklik *Fides et Ratio* dari Yohanes Paulus II dengan indah melukiskan keterpautan kedua ilmu ini pada wilayah metaforis, bagai “kedua sayap” yang mengepak untuk terbang kepada kontemplasi kedalaman relasi manusia dengan Allahnya. Teologi bergulat dengan “Fides” sementara Filsafat berada pada tataran “Ratio” yang memadu, bertemu, bersaing, dan menjadi emblem dari kedalaman perjalanan iman manusia. Jika “sayap” satu dibawa oleh gerbong rumpun “Agama” dan yang lain berada di gerbong rumpun “Humaniora”, terjadi kerancuan metodologis dan ketidakjelasan perspektif eksplorasinya.

C. DISKUSI DALAM RANGKA “MENEMUKAN” NAMA PRODI “FILSAFAT DIVINITAS” (SEBAGAI PENGGANTI PRODI “TEOLOGI”)

Diskusi bersama dalam email secara intensif terjadi pada bulan April antara tanggal 24-25 2014. Email terhubung di hampir semua pimpinan lembaga PT teologi yang tergabung dalam KoLITI dan PERSETIA. Dalam kutipan-kutipan berikut ini tidak dituliskan nama2 penerima. Hanya nama pengirim email. Diskusi sangat “ramai” dan intens serta cepat. Ketika itu saya ada di Chicago. Pagi buta, April 24, saya di-“bel” oleh Romo Pidyarto (Ketua STFT Widya Sasana, Malang) mengenai perkembangan baru berkaitan dengan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2014-04-24 9:47 GMT-05:00

Romo [Armada], ini ada BBM dari rm. Eddy.
 Romo, hari ini Pak Mite (dari Atmajaya Jkt) sudah berhasil hubungi bu Mega (Staf ahli Dirjen Dikti Bidang Hukum). Ibu Mega menjelaskan bhw semua nama lembaga yg pakai nama teologi atau agama sdh pasti berada di bawah Depag. UU atau PP ataupun RPP sudah sulit diubah. Malam ini bu Mega akan kirim email lewat pak Mite dan minta kita semua lembaga teologi utk usul nama lain dan akan segera beliau cantumkan di nomenklatur. [...] Kalau kita sudah usul nama, beliau akan langsung masukkan dlm daftar nomenklatur dan otomatis tdk perlu bernaung di bawah Depag. Kalau malam ini beliau kirim, maka besok kita semua diharap kirim usulan nama pada bu Mega berikut gelar lulusannya. [Pidyarto]

date: Thu, Apr 24, 2014 at 11:47 PM

subject: USULAN NAMA ALTERNATIF PRODI TEOLOGI

Dear Pak Beny Mite dan Pak Marcel, Selamat pagi.

Saya di-bel Romo Pid mengenai usulan untuk mengganti nama "teologi" atau "agama". Berikut di bawah usulan saya.

Hukum bergerak dalam kata dan terminologi. Bila kita bisa mengusulkan nama yang tidak dicakup oleh hukum, bagus. Hukum bukan bergerak dalam "nuansa" atau "makna sayap". Teriring salam, semoga berhasil. Kita memang mesti bersatu padu bersama-sama berjuang. armada cm (chicago)

Date: 2014-04-24 11:33

Ytk. Romo Pidyarto, Romo Madyo, dan Romo Eddy. Saya ingin menyumbang ide berkenaan dengan nama prodi yang bisa dimasukkan ke nomenklatur untuk tetap di bawah naungan DIKTI.

Prodi

Filsafat ILMU KEGEREJAAN

- Yang harus disimak, apakah dalam PP atau RPP tersebut mencantumkan "gereja" atau tidak?. Bila yang dicantumkan dalam PP kata-kata "agama", "teologi", dan kata "ke-Gereja-an" tidak ada, kita bisa berargumen ini bisa menjadi pilihan.

- "ILMU KEGEREJAAN" merupakan kata "payung" untuk segala apa yang menjadi ranah disiplin ilmu kita. Jadi, barangkali hal ini bisa menjadi pemecahan.

- Gelar bisa usulkan **S.FiK** (Sarjana Filsafat ilmu kegerejaan)

Atau usulan kedua,

Filsafat ILMU DIVINITAS

- Terminologi "Divinitas" lebih punya nuansa "internasional". Jelas terminologi "Divinitas" tidak ada di dalam PP. Hal-hal yang merupakan penjabaran dari ilmu divinitas ada di dalam ranah kompetensi keilmuan.

- Gelar bisa kita usulkan dengan **S.FiD** (Sarjana Filsafat ilmu Divinitas).

Hukum pendidikan di tanah air benar-benar terus berubah-ubah. Ikut prihatin. Tetapi, semoga kita tidak keburu "menghilangkan" begitu saja terminologi pengganti kata "teologi" atau "agama". Bahwa, kita akan diberi "nomenklatur" di Dikti, ini sudah merupakan langkah positif. Teriring salam, armada cm (Chicago)

date: Thu, 24 Apr 2014 16:35:40 -0700 (PDT)

Rekan-rekan, para Rama, para Bapak dan Ibu terkasih

Terimakasih sekali atas info dari Bapak Beny Mite. Usulan dan bantuan dari Ibu Mega tentang Nomenklatur kiranya sebuah langkah yang baik, daripada kita berjuang di RPP yang tampaknya tidak akan pernah berhasil.

Usulan saya:

1. Kalau dimungkinkan, sebaiknya kita memiliki usulan nama yang kurang lebih sama atau kompak dalam hal ini. Di tingkat pengurus KoLITI pernah didiskusikan nama prodi pengganti teologi dengan: Filsafat Ilmu Ketuhanan. Ada usulan dari Rm Armada: Filsafat Ilmu Kegerejaan, atau Filsafat Ilmu Divinitas. Bu Mega usul: Filsafat Keagamaan. Bagaimana sebaiknya? Masih ada usulan nama yang baik dari isi dan "keamanan" dari sisi UU? Lalu nama gelar?
2. Sebaiknya kita juga bergerak bareng termasuk proses pengajuan perubahan nama itu ke Dikti. Pertanyaannya: bagaimana proses atau prosedurnya, lalu apa kita kurang lebih bisa bareng-bareng dari sisi waktunya memulai proses perubahan nama itu. Dampak tentu besar karena mengubah Renstra, rumusan visi-misi, kurikulum dst. Mungkin pak Beni Mite masih bisa bertanya ke bu Mega soal prosedur ini.

Kami tunggu tanggapan-tanggapan dan usulan bersama. Terimakasih. Berkah Dalam Martasudjita Pr

date: Fri, 25 April 2014 0:00

Yth para Romo dan teman-teman yang mengelola Prodi-prodi teologi dan pendidikan teologi se Indonesia Kristen dan Katolik. Setelah berhasil menghubungi ibu Mega Santoso sekitar 20.30 WIB, baru saja saya mendapat email dari beliau tentang daftar nama prodi teologi, ilmu teologi, pendidikan teologi, dan ilmu pendidikan teologi. Menurut uu no 12, nama-nama lama itu sudah pasti masuk dalam binaan kemenag. Kalau mau tetap memakai nama yang ada kata "teologi" artinya prodi tersebut bersedia dibina oleh kemenag. Sesuai dengan perjuangan KoLITI, KIPTI dan PERSETIA, saya asumsikan kita banyak Prodi kita yang mau tetap berada di bawah binaan kemendibud. Jika demikian, mohon usul nama dan dituliskan pada kolom biru dan saya akan teruskan kepada ibu Mega Santoso. Ibu Mega sendiri sudah memberi kemungkinan nama yang bisa dipilih yaitu Filsafat Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan. Kiranya nama tersebut aman dari pengaturan UU no 12 untuk dimasukkan ke dalam binaan kemenag. Selain itu, nama yang dimulai dengan "filsafat" gelarnya S.Hum dan magisternya M.Hum. Dan, nama yang dimulai dengan, "pendidikan" gelarnya S.Pd, dan M.Pd untuk S2. Ibu Mega minta bantuan saya mengirimkan usulan nama-nama itu besok, 25 April 2014. Shalom. m beny mite

date: Fri, Apr 25, 2014 at 5:17 AM

Diusulkan nama Prodi Teologi menjadi Prodi Filsafat Keagamaan, Gelarnya (S1); SHum. Salam, Eddy Kristiyanto

date: Fri, Apr 25, 2014 at 5:30 AM

Rm Edi yb, Nama Prodi "Filsafat Ilmu Keagamaan" berasal dari usulan Bu Megawati [Email Benny Mite]. Pertanyaan kecil saya: Bila Ibu Megawati dari dikti sudah berpindah tugas, apakah nama "agama" (meski dengan awalan dan akhiran ke---an) tidak disalahmengerti oleh pengganti beliau? Sebab, karena langsung ada kata "agama", maka masuk ke ranah Departemen Agama? armada cm

date: Fri, Apr 25, 2014 at 6:17 AM

Saya juga kuatir adanya kata 'agama' dan 'keagamaan' akan menjadi pintu masuk yang akan dipergunakan oleh kementerian agama lagi.

Kalau saya tidak keliru menangkap semangat rekan-rekan di lingkungan Persetia yang sudah lama bernaung di Dikti, dan yang berencana alih-bina ke Dikti, maka **penggunaan Divinitas seperti yang diusulkan rm Armada adalah yang paling cocok bagi kami.**

Untuk itu saya memberanikan diri untuk mewakili semua prodi teologi yang ada dalam daftar yang dikirimkan pak Mite, untuk mencantu kan dalam kolom biru Sarjana Filsafat Ilmu Divinitas. salam perjuangan, Yusak Soleiman, Ph.D.

date: Fri, Apr 25, 2014 at 6:28 AM

Saya juga merasa seperti Pak Yusak.

Kata "keagamaan" masih terasa rentan bisa mudah diambil alih depag, sebab di dalam UU itu sendiri sudah ada kata atau sejenis itu yang mencantumkan "pt agama" atau "keagamaan". Saya baca berkali-kali itu UU. Teriring salam, Armada

date: Fri, Apr 25, 2014 at 7:15 AM

Teman2, utk hindari kata iman atau agama, saya usulkan atau "divinity" (Rm Armada) atau "mistagogi" (mencakup Pendidikan maupun teologi) tapi tak bahaya dibawa ke kement agama. Mardi bs

date: Fri, Apr 25, 2014 at 7:38 AM

Pak Benny,

Mohon disamping usulan Nomenklatur prodi, juga apakah bisa diusahakan berbincang-bincang dengan Ibu Megawati dari dikti mengenai PROSEDUR Mengubahnya, agar kita semua langsung bisa tahu caranya dan agar semua kawan-kawan pegawai di dikti juga langsung mengerti mengenai NOMENKLATUR itu. Akan lebih baik lagi bila secara bersama-sama kita bisa mengurusnya dalam waktu yang kurang lebih bersamaan.

Usulan dari Romo Martasujito mengenai agar ada **satu prodi untuk pengganti teologi dan satu prodi untuk agama**, baiknya kata "satu" itu dimaknai sebagai semacam payung nama untuk nomenklatur (bukan satu-satunya nama prodi yang harus demikian untuk selanjutnya). Misalnya begini, bila prodi itu bernama Ilmu **"Divinitas" atau "Kegerejaan" atau "Ketuhanan" atau "Keagamaan"** hal itu tetap dimungkinkan dan itu semua memaksudkan prodi yang sama yang ada dalam naungan dikti. Berkah Dalem, armada cm

date: Fri, Apr 25, 2014 at 7:43 AM

Di lingkungan Pengurus KoLITI dimajukan usul: Prodi Filsafat Ilmu Ketuhanan. Ini hasil meeting di Kentungan, Jogjakarta, 11 April 2014. Eddy Kris

date: Fri, Apr 25, 2014 at 8:37 AM

Rm. Eddy benar, kita perlu memikirkan rumpun ilmu dan seperti untuk mudah dalam koordinas, baiknya memilih nama yang mirip atau utamanya benar-benar sama. Shalom. m beny mite

date: Fri, Apr 25, 2014 at 8:44 AM

Saya sedang diskusi dengan Romo Eddy, Penyebutan Filsafat Ilmu Ketuhanan terasa agak jumbuh dengan "subject matter"-nya filsafat ketuhanan (bagi yang menggumuli filsafat). Sebagai prodi sebaiknya dipakai istilah yang "memayungi" (menjadi payung dari subject matters teologis). Dan, mungkin "DIVINITAS" lebih pas. Divinitas bisa kita pandang sebagai Latin dan Indonesia sekaligus. Maka, usul saya "Filsafat Ilmu Divinitas" mungkin yang lebih mewakili. Salam, armada cm

[Empat Email di bawah merupakan diskusi pribadi dengan Romo Eddy Kristianto]

2014-04-24 19:36 GMT-05:00

Piye kalo Prodi teologi diganti dg nama Prodi Filsafat Ilmu Ketuhanan. Ini usulan Pengurus KoLITI dlm rapat di Kentungan, 11 April lalu? Eddy Kris.

Date: Thu, 24 Apr 2014 19:43:40 -0500

DEAR ROMO EDI, Sebagai yang menggumuli filsafat, kalau menyebut prodi FILSAFAT ILMU KETUHANAN, rasane nama itu agak jumbuh dengan subject-matter (nama mata kuliah). Terus, kurikulumnya sepertinya akan menjadi penjabaran dari filsafat ketuhanan itu. Itulah sebabnya, saya mengusulkan "padanan" dari bahasa Latin-nya, yang juga bisa dipakai sebagai bahasa Indonesia: FILSAFAT ILMU DIVINITAS. Dan, bila itu dibawa kepada gelar, halnya menjadi lebih pas dan meng-internasional. Menurut saya, FILSAFAT ILMU DIVINITAS lebih memiliki nuansa internasional. Teriring salam. armada

2014-04-24 20:04 GMT-05:00

Meskipun di Prodi Fils, yang dipakai Fils Ketuhanan, dan bukan Filsafat Ilmu Ketuhanan, ya. [Eddy Kris]

Date: Thu, 24 Apr 2014 20:33:49 -0500

Ya. Kata "ilmu" nggak cukup membedakan (bagi yang menggumuli filsafat). Meskipun bagi para filosof -- sejauh saya tahu -- yang penting substansinya bukan kulitnya. Tapi, kalau nama prodi, sebaiknya dicari "yang memayungi" semua. Kayaknya Pak Yusak, juga Romo Marta tidak keberatan. Juga Romo Pid. Sekedar urun rembug. Salam. armada.

[Diskusi Bersama Kembali]

Date: Fri, 25 Apr 2014 07:29

Rm Eddy benar. Yang saya bayangkan, misalnya untuk prodi-prodi di lingkungan Persetia, ketika kami memilih nama prodi Studi Filsafat Ilmu Divinitas, maka gelarnya Sarjana Ilmu Divinitas (atau Sarjana Divinitas) Master Divinitas, Doktor Divinitas. Istilah filsafat, yg dicantumkan dalam prodi, tidak perlu dicantumkan dalam gelar. Karena nama prodi menggunakan filsafat ilmu bla bla bla, maka prodi ini berada dalam rumpun humaniora. Yusak Soleiman, Ph.D.

From: Emanuel Martasudjita

Sent: 25 April 2014 8:13

Rekan-rekan terkasih

Tadi saya kontak dengan Rm Eddy Krist dan pak Beni Mite. Intinya kita mesti segera mengusulkan nama untuk Nomenklatur ilmu kita. Jelas rumpun yang kita pilih rumpun

humaniora. Dari FTW atau Kentungan, setelah saya mengontak beberapa teman, tampaknya semakin condong dan setuju dengan usulan [Romo Armada] dan pak Yusak: **Filsafat Ilmu Divinitas** untuk pengganti Prodi ilmu teologi.

Dari teman-teman Pendidikan Agama Katolik tampaknya diusulkan pengganti Pendidikan Keagamaan seperti usulan bu Mega (begitu kalau saya tidak salah dari usulan pak Beni Mite). Prinsipnya: saya berharap kita sebaiknya memiliki usulan nama yang sama antara Persetia dan KoLITI. Ada tanggapan? Terimakasih. Salam Martasudjita Pr

From: Eddy Kristiyanto

Sent: 25 April 2014 8:34

Kita golkan saja istilah ini: **Filsafat Ilmu Divinitas**.

Fakultas Teologi > **Fakultas Filsafat**

Prodi Ilmu Teologi > **Prodi Ilmu Divinitas**. (Istilah "divinitas" tidak berumpuk dan tidak seperti "ilmu teologi": sudah memakai akhiran "logos" masih ditambah "ilmu").

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi > **Sekolah Tinggi Filsafat**.

Tentang Gelar S1 > Shum

Tentang Kurikulum "kita pikir sambil jalan".

Salam, Eddy Krist OFM

from: Franciscus Armada

to: Eddy Kristiyanto

date: Fri, Apr 25, 2014 at 8:47 AM

SETUJU BANGET. Good Job.

Salam dari Chicago. armada cm

date: Mon, Apr 28, 2014 at 7:41 PM

Pak Beni dan kawan2 yang baik, Jika yang diminta adalah TERJEMAHAN bahasa Inggris, kemungkinannya dua:

Atau PHILOSOPHY OF DIVINITY SCIENCES

Atau **PHILOSOPHY OF DIVINITY STUDIES**

Pemakaian plural lebih pas daripada tunggal, karena ini program studi untuk memayungi banyak mata kuliah. Pemakaian "studies" umum di sini di Amerika untuk disiplin ilmu-ilmu teologis, seperti "interreligious studies" atau "Islam studies" atau "Catholic studies" (di Depaul University Chicago dan di universitas lain). Pemakaian "science" atau "sciences" umum digunakan untuk ilmu-ilmu positif semacam "Computer science" atau "Earth Science", dan yang sejenis. Maka, jika kawan-kawan sepakat "**Philosophy of Divinity Studies**" lebih pas. Saya ikut senang dengan kelancaran komunikasi dengan Ibu Mega dari Dikti. Thank you Pak Beny, keep it up. Teriring salam. armada cm

date: Mon, Apr 28, 2014 at 8:21 PM

pak Beny yb., dan rekan-rekan sekalian, mengenai prodi yang diberi warna hijau, rupanya semuanya adalah prodi Pendidikan Kristiani/Pendidikan Agama Kristen. Kalau begitu istilah bahasa Inggrisnya adalah Religious Education, dan gelarnya adalah S.Pd. Mengenai gelar untuk prodi Filsafat Ilmu Divinitas, saya setuju dengan usul Romo Armada, Philosophy of Divinity Studies. Sekalipun istilah ini agak janggal, namun lebih mendekati dengan nama bahasa Indonesia-nya. Di US maupun EU umumnya memang Divinity Studies, School of Divinity, dan Religious Studies entah masuk dalam fakultas teologi atau fakultas ilmu humanitas., dan tanpa ada istilah Philosophy. Tapi yah inilah situasi kita sekarang, justru kata kunci Philosophy itulah yang memberi penegasan *bukan wilayah Kementerian Agama*. Salam, Yusak Soleiman, Ph.D.

date: Mon, Apr 28, 2014 at 9:54 PM

Pak Beni dan teman-teman, Terimakasih sekali atas usaha pak Beni dan usaha terjemahan dari teman-teman untuk nomenklatur: Filsafat Ilmu Divinitas. Kami dari Fakultas Teologi USD, Kentungan - Yogyakarta, juga menyetujui terjemahan Inggris: Philosophy of Divinity Studies. Memang sebenarnya Philosophy sendiri sudah suatu studies, jadi sebenarnya bisa cukup: Philosophy of Divinity, dan kalau masih ditambah studies jadi rancu. Namun karena Indonesianya kita menggunakan kata ilmu, maka kami sependapat dengan pak Yusak dan Rm Armada, bahwa terjemahan Philosophy of Divinity Studies sudah yang paling mendekati (meski tetap agak janggal. He he). Jadi pada pak Beni, oke kita ajukan terjemahan Filsafat Ilmu Divinitas dengan Philosophy of Divinity Studies. Tidak tahu tanggapan teman-teman yang lain? Kita memang pantas berterimakasih pada bu Mega dan Pak Thomas. Sebaiknya pak Beni menemui Prof Thomas dengan teman-teman yang di Jakarta, semoga bisa. Kami titip salam dan terimakasih saja. Teriring doa dan salam. Berkah Dalem. Martasudjita Pr

date: Sat, May 3, 2014 at 11:14 PM

Yg menentukan kiranya bukan terjemahan (bagi mereka yg akan kerja dan belajar di luar negeri) melainkan isinya. Kata "divinity" kan tidak dihilangkan mengingat judul selengkapnya philosophy of divinity! Yang diusulkan untuk dihilangkan adalah studies dalam philosophy of divinity studies. Nah, philosophy of divinity itu kalau diindonesiakan apa? Diusulkan jadi filsafat keilahian, dan sebaiknya bukan filsafat divinitas, terutama mengingat kata divinitas belum menjadi kata bahasa Indonesia. Tetapi kata keilahian sudah baku dan dikenal dalam bhs Indonesia. Apakah ada keberatan prinsipal? Kalau pun ada, diskusi kita tidak punya dampak dalam rangka perubahan dan penyesuaian nomenklatur, karena yang sudah dimajukan kemarin dulu adalah "filsafat keilahian", terutama untuk nama program studi, bukan untuk Fakultas atau STFT. Itu berarti kiranya hanya berdampak pada STT dan STF. Driyarkara, misalnya, yang memiliki Prodi Teologi. Eddy Krist.

date: Sun, May 4, 2014 at 2:42 AM

Kawan-kawan yb, Ada dua hal (yang diminta) dari kutipan tanggapan Romo Edi, jika tidak keliru mengerti:

1. Apakah "Filsafat Divinitas" atau "Filsafat Keilahian" sebagai terjemahan dari "Philosophy of Divinity"?

2. Apakah isi dari (Filsafat) "Divinitas"?

Tanggapan saya:

- Untuk nomor 1 - "Divinitas" atau "Keilahian" sama saja, menurut saya. Hanya apabila hendak digunakan sebagai "nama" prodi, kiranya lebih condong ke "Divinitas". Sebagai "kata", Divinitas terdengar baru (dalam bahasa Indonesia), sementara "keilahian" sudah dimiliki

bahasa Indonesia. Benar. Tetapi sebagai nama prodi "Filsafat keilahian" juga sama-sama baru. Bila menyebut Filsafat Divinitas, halnya menjadi seperti prodi-prodi teologi di banyak universitas di dunia.

- Untuk Nomor 2 - Apa isi dari "Divinitas". Terminologi ini sebenarnya memiliki rujukan sejarah. Pseudo-Dionysius (authorship antara 485-518/28) menulis tentang *On the Divine Names or De Divinis Nominibus*. Sebutan "Dionysius" diasalkan dari persepsi diri seperti Dyonisius yang setelah mendengar kotbah Paulus di Atena (kotbah kepada para filosof dalam Kis. 17: 16-34) kemudian percaya kepada Kristus. Jadi, "Pseudo-Dyonisius" pada mulanya adalah seorang filosof. Sementara, buku *De Divinis Nominibus* merupakan salah satu karya teologi besar pada awal-awal perkembangan kekristenan yang mengeksplorasi pembahasan Allah Pencipta dan seluk beluk interpretasi keterbatasan bahasa manusia hingga teologi apofatis. Dari *De Divinis Nominibus* itulah barangkali mengalir apa yang kemudian disebut dengan terminologi *Divinity studies* itu, yang tidak tidak lain adalah teologi itu sendiri.

Tambahan kecil, "De Divinis Nominibus" merupakan salah satu karya besar, panjang cukup komprehensif pada zamannya tentang teologi (ilmu tentang "Theos"). Dan jika karya itu ditulis oleh orang yang mula-mula seorang filosof, halnya (dari terminologi *De Divinis* menjadi Divinitas) kiranya klop dengan dengan isi dan maksud dari isi program studi yang selama ini dijalankan.

Maka, menurut pendapat saya, kalau ingin mengenalkan nama lain dari prodi "Teologi" (nama prodi itu kini sudah diangkut di gerbong depag, sayang sekali memang) adalah Filsafat Divinitas. Sementara bila hendak menyebut pengindonesiaan-nya dari "Divinitas" dengan "Keilahian", juga tidak berkeberatan.

Sementara mengenai isi dari Prodi Filsafat Divinitas, dalam hati saya mengusulkan tidak ada perubahan esensial apa-apa menyangkut kurikulum, sebab tujuan kita mengalihkan nama dari "teologi" ke Filsafat Divinitas adalah untuk menghindari gerbong depag seturut UU 12 (2012). Untuk sekedar pandangan. Mohon maaf, agak panjang. Teriring salam dan Berkah Dalem, armada.

D. [Diskusi kelanjutan untuk KURIKULUM]: Apakah Prodi berganti nama, nama-nama mata kuliah juga harus disesuaikan? Diskusi diawali dengan email dari Romo Madyo SJ.

date: Thu, Jun 19, 2014 at 9:09 PM

subject: Keluarnya Nomenklatura

Para Kolega yang baik,

Proficiat utk kita semua! Terima kasih atas kegigihan "tim" sehingga nomenklatura akhirnya keluar. Masih ada pertanyaan dan tugas yang harus kita lakukan: (1) apakah semua matakuliah yang berjudul Teologi...perlu diubah namanya?; (2) Apakah dosen2 yang mendapatkan gelar (S2 dan S3) Teologi, tidak akan mengalami kesulitan dalam mengurus kenaikan kepangkatan akademis? Selamat berpikir secara kreatif. Salam, Madya.

date: Thu, Jun 19, 2014 at 10:11 PM

Rm. Madya dan rekan-rekan yb.,

Saya ikut bersyukur atas keberhasilan perjuangan rekan-rekan dalam mendapatkan nomenklatur baru itu. Jawaban atas pertanyaan Romo mungkin demikian:

1. Selama ini Dirjen Dikti tidak pernah mengatur kuliah dan nama-namanya, kecuali beberapa matakuliah wajib, misalnya Kewarganegaraan. Itupun hanya nama saja, isinya terserah masing-masing prodi. Jadi, kali ini pun mestinya masih seperti itu.

2. Jika yang Romo maksud dengan gelar adalah linearitas studi, saya kira kita dapat memberikan penjelasan bahwa studi dosen-dosen kita berada dalam jalur yang sama dengan Filsafat Keilahian. Bukankah dalam soal ini hanya kita yang tahu seluk beluknya dan pemerintah (termasuk mereka yang di Kemenag) justru perlu belajar dari kita?

Sekaligus juga mengantisipasi pertanyaan sejenis berkenaan dengan ijin dari Dikti / Kopertis. Dalam hal ini pun tidak ada yang perlu diganti atau diperbarui. Ijin yang selama ini kita pakai tetap berlaku. Setidaknya demikianlah yang dinyatakan oleh Kopertis wilayah V (DIY).

Ijinkan saya memakai kesempatan ini untuk sekaligus memberikan kabar bahwa Pak Yusak Soleiman baru saja terpilih sebagai Ketua Persetia periode 2014-8, menggantikan saya. Saya percaya dengan itu kerjasama kita akan menjadi semakin baik.

Salam, Robert Setio.

date: Fri, Jun 20, 2014 at 12:44 AM

Dear kawan-kawan,

Ikut bersyukur atas perkembangan baru ini. Terimakasih kepada semua.

Observasi kecil saya:

- Karena surat yang ditujukan kepada Universitas Sanata Dharma ditulis oleh Kopertis Wilayah V (berdasar pertimbangan Dikti), saya menduga dan berharap seluruh kopertis melakukan yang sama kepada sekolah-sekolah yang berubah prodi-nya. Dkl., keputusan itu sepertinya otomatis juga untuk PT2 yang lain. Sebab nomenklatur prodi di dikti telah berubah, juga nomor kodennya (otomatis untuk pelaporan EBSBED juga akan menyesuaikan). Menyambung Pak Robert dalam menjawab pertanyaan Romo Madya berikut ini: (1) apakah semua matakuliah yang berjudul Teologi...perlu diubah namanya?; (2) Apakah dosen2 yang mendapatkan gelar (S2 dan S3) Teologi, tidak akan mengalami kesulitan dalam mengurus kenaikan kepangkatan akademis?

Konsiderasi saya:

(1) Sepertinya seluruh mata kuliah yang berjudul TEOLOGI, tidak perlu berubah nama. Mengapa? Sebab, konten kurikulum tidak tunduk pada UU Pendidikan 12 (2012), melainkan tunduk pada ketentuan peraturan kurikulum PT yang adalah "Kurikulum Inti". Kurikulum PT punya kemandirian. Artinya, Dikti jelas tidak akan ambil bagian di dalam nama-nama subject matter perkuliahan. Ini bukan wilayah mereka (kecuali dinyatakan secara eksplisit karena pertimbangan lain). Sekedar untuk padanan, program matematika (misalnya) tidak akan diintervensi oleh Dikti berkaitan dengan mata kuliah apa pun yang berkaitan dengan Aljabar atau apa pun. Apa yang digariskan oleh UU 12 (2012) adalah PROGRAM STUDI, bukan nama (atau isi) mata kuliah per subject matter. Jadi, kita tidak perlu atau tidak harus mengubah nama-nama mata kuliah sedemikian rupa sehingga seolah-olah diperoleh nama-nama yang "sesuai" dengan nama prodi.

Bagaimanapun juga, sebagai prodi baru, tetap mungkin ada gunanya untuk membicarakan beberapa perbaikan, semisal kesepakatan mata kuliah-mata kuliah inti untuk prodi Filsafat Keilahian. Tetapi nama teologi - menurut saya - JANGAN dilenyapkan (apakah itu dengan nama baru atau dengan pertimbangan lain).

(2) Linearitas jenis ini tetap bisa dijelaskan dari "Divinity" (nama prodi kita) yang tidak berbeda dengan Teologi. Di beberapa universitas dipakai "Magister of Divinity." instead of "Magister of Theology". Jadi, tetap linear. Surat Dikti (dan kopertis) perihal perubahan nama dari teologi ke philosophy of divinity menjelaskan juga perihal ini.

Semoga sedikit membantu. Berkah Dalem, armada.

date: Fri, Jun 20, 2014 at 10:55 AM

Rm. Armada, Rm. Madya, dan para kolega lainnya,
Menyambut gagasan Rm. Armada mengenai kurikulum inti prodi baru kita, saya usul kita membuat sebuah pertemuan untuk membicarakannya, sekaligus saling berbagi dan belajar tentang kurikulum masing-masing. Yogya akan dengan senang hati menjadi tuan ruman.
Berkah dalam, Robert.

date: Fri, Jun 20, 2014 at 2:40 PM

Teman-teman terkasih,
Saya setuju agar kita mengadakan pertemuan bersama, Persetia dan Koliti, dengan kelompok asosiasi teologi Katolik ataupun Protestan, untuk membicarakan kurikulum. Saya setuju usul pak Robert, Yogya siap menjadi tuan rumah, terserah mau di UKDW atau Sanata Dharma. Apakah teman-teman dari STFT di luar Yogya sudah mencari informasi dari Kopertis masing-masing mengenai perubahan nomenklatur?
Kami teman-teman F Teo Kentungan juga mengucapkan selamat kepada Pak Robert yang telah menyelesaikan pengabdian sebagai Ketua Persetia, dan Selamat Bekerja untuk pak Yusak Soleiman. Semoga kerjasama dan komunikasi kita semua semakin erat dan berbuah lebat bagi kemajuan bersama kita di bumi Indonesia ini.
Salam dan doa. Berkah Dalem. Martasudjita pr

E. APAKAH NAMA-NAMA MATAKULIAH TEOLOGI PERLU BERGANTI NAMA, SEIRING DENGAN PERUBAHAN NAMA PRODI?

Saya berpendapat **TIDAK**. Di bawah dilampirkan Keputusan Menteri tentang *Kurikulum Inti Perguruan Tinggi*. Bahwa perihal kurikulum PT, halnya berada dalam kewenangan Penyelenggara Perguruan Tinggi. Sebenarnya masih ada satu dua pedoman lagi perihal rancangan kurikulum, seperti *Standar Nasional Perguruan Tinggi No 49, 2014* (misalnya 72 SKS untuk Pasca dst.), tetapi Keputusan Menteri tentang Kurikulum Inti ini barangkali sudah cukup membantu mengerti mengenai keleluasaan PT untuk mengurai kurikulumnya.

Pemerintah menggariskan satu dua kompetensi. Menurut Ibu Dr. Ir. Illah Sailah, MS, perihal kompetensi pun tidak perlu dimaknai sebagai sebuah “kluster” matakuliah (Bdk “Kurikulum Berbasis Kompetensi: Sumbangan Pemikiran Kolektif.” Makalah dipublikasi dalam blok pribadinya, tertanggal 08 November 2012). Konsekuensi dari “Kurikulum Inti” tersebut demikian: Kompetensi lulusan prodi jelas berada dalam kewenangan penyelenggara; dan, dari sendirinya isi penjabaran kompetensi dalam mata kuliah-mata kuliah tidak mungkin “diintervensi” oleh Dikti. Kapasitas dan kapabilitas PT dalam merancang prodi dengan kompetensi lulusan menjadi wujud kemandirian dari sistem pendidikan tinggi.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ibu Megawati, dalam SMS Romo Eddy Kristianto OFM (tertanggal 19 November 2014), bahwa nama-nama mata kuliah untuk Prodi Filsafat Keilahian berada dalam kewenangan penyelenggara kompetensi prodi tersebut.

Jadi, kompetensi mengatakan penegasan VISI dari Prodi-nya, bahwa Prodi ybs akan membawa peserta didik kepada kompetensi demikian. Dengan kata lain, penegasan nama-nama mata kuliah dalam Prodi berada pada kewenangan PT Penyelenggara yang bersangkutan. Inilah sebabnya saya memiliki keyakinan bahwa disiplin ilmu teologi yang berada dalam Prodi nama Filsafat Keilahan (Filsafat Divinitas) tidak perlu berganti nama atau berkamuflase dengan seolah-olah filosofis! Sebab, ilmu teologi sudah memiliki “kodrat” keterpautan dengan filsafat itu sendiri.

Disiplin ilmu “Teologi” tetap eksis dan harus tetap eksis, dalam maksud tetap memiliki segala keleluasaannya untuk dikembangkan dalam berbagai perspektif kontekstual-interdisipliner sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 045/U/2002**

**TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Menimbang :

- a. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh;
- b. bahwa Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;
- c. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menambah rambu-rambu penyusunan kurikulum inti sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M T 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KURIKULUM INTI
PENDIDIKAN TINGGI**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Pasal 2

(1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :

- a. kompetensi utama;
- b. kompetensi pendukung;
- c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.

(2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas :

- a. landasan kepribadian;
- b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
- c. kemampuan berkarya;
- d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Pasal 3

(1) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.

(2) Kurikulum inti suatu program studi bersifat :

- a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
- b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
- c. berlaku secara nasional dan internasional;
- d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
- e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

(3) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditegaskan oleh institusi penyelenggara program studi.

Pasal 4

(1) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai :

- a. nama program studi;
- b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
- c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
- d. persyaratan akademis dosen;
- e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
- f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mendalami elemen-elemen kompetensi;
- g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;
- h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.

(2) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra :

- a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berke dayaan;
- b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya.

Pasal 5

Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.

Pasal 6

(1) Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Pe ilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

(2) Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan Nasional masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum ini oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2002
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
A. MALIK FADJAR
